

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Data penelitian

Deskripsi dari hasil penelitian ini akan menunjukkan keberadaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Tasikmalaya yang menjadi sampel dalam penelitian, mengenai *good governance* dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja pemerintah daerah. Adapun berikut data Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi responden penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Responden Penelitian

No	Nama SKPD	Nilai (2021)	Kategori (2021)
1	Sekretariat Daerah	81,81	A
2	Sekretariat DPRD	76,36	BB
3	Dinas Pendidikan	72,65	BB
4	Dinas Kesehatan	72,47	BB
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	81,06	A
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	77,05	BB
7	Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindag	77,07	BB
8	Dinas Perhubungan	82,59	A
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	78,26	BB
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	74,4	BB
11	Dinas Sosial	68,52	BB
12	Dinas Tenaga Kerja	73,35	BB
13	Badan Pendapatan Daerah	77,95	BB
14	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	79,19	BB
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	70,72	BB
16	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan	83,02	A

	Pengembangan Daerah		
17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	80,49	A
18	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	82,94	A
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	72,77	BB
20	Inspektorat	84,39	A
21	Dinas PPKBPP dan Perlindungan Anak	71,2	BB
22	Dinas Lingkungan Hidup	71,51	BB
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	76,28	BB
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	74,14	BB
25	Satuan Polisi Pamong Praja	69,81	BB
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	60,39	BB
27	Kecamatan Kawalu	73,19	BB
28	Kecamatan Cihideung	79,51	BB
29	Kecamatan Tawang	81,04	A
30	Kecamatan Cipedes	74,12	BB
31	Kecamatan Mangkubumi	75,12	BB
32	Kecamatan Cibereum	82,59	A
33	Kecamatan Purbaratu	74,1	BB
34	Kecamatan Tamansari	74,77	BB
35	Kecamatan Indihiang	80,53	A
36	Kecamatan Bungusari	77,26	BB

Sumber: Data Diolah Peneliti

Kuesioner yang digunakan pada penelitian kali ini disampaikan langsung kepada responden bersangkutan dengan cara mendatangi langsung ke tempat penelitian tersebut, dengan waktu yang telah disepakati dengan responden. Jangka waktu yang diberikan selama dua minggu terhitung setelah kuesioner disebar, dan kuesioner diambil kembali oleh peneliti. Kuesioner yang disebar adalah sebanyak 72 dan masing-masing SKPD yang menjadi sampel disebar 2 kuesioner. Dari 72 kuesioner yang telah disebar semuanya dikembalikan.

Melalui tanggapan responden tersebut dapat memberikan informasi dan gambaran yang jelas terkait tata kelola pemerintah yang baik, penerapan sistem

pengendalian intern di pemerintah, dan kualitas kinerja kepegawaian dalam pemerintah daerah.

4.1.2 Analisis Data Penelitian

Untuk menyederhanakan interpretasi dari setiap tanggapan responden, penulis mengacu pada kriteria yang dikemukakan oleh Sugiyono (2007: 152) dengan prosedur sebagai berikut:

1. Menentukan nilai tertinggi dari setiap indikator

$$\text{Nilai tertinggi dari setiap indikator} \quad 72 \times 5 = 360$$

2. Menentukan nilai terendah dari setiap indikator

$$\text{Nilai terendah dari setiap indikator} \quad 72 \times 1 = 72$$

3. Menentukan jumlah kriteria pernyataan $= 5$

4. Menentukan panjang interval: rasio selisih nilai tertinggi dan nilai terendah dengan kriteria pernyataan.

$$NJl = \frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Jumlah Kriteria Pernyataan}} = \frac{360 - 72}{5} = 57,6 = 58$$

Berdasarkan prosedur di atas, maka klasifikasi kriteria tanggapan responden yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2
Klasifikasi Kriteria Tanggapan Responden

Interval	Keterangan
72 – 129	Sangat Buruk
130 – 187	Buruk
188 – 245	Cukup Baik
246 – 303	Baik
304 – 360	Sangat Baik

Sumber: Data Diolah Peneliti

4.1.2.1 *Good Governance* pada SKPD Kota Tasikmalaya

Untuk memperoleh data yaitu salah satunya dengan cara menyebarkan kuesioner yang terdiri dari daftar pernyataan-pernyataan yang telah disajikan dalam bentuk kuesioner. Adapun kuesioner tersebut diberikan kepada 36 SKPD Kota Tasikmalaya yang menjadi sampel penelitian, setiap variabel dibagi kepada beberapa responden. Pada variabel (X_1) yaitu mengenai *good governance* diisi oleh pegawai yang berkaitan dengan sekretaris dan keuangan.

Untuk mengetahui jawaban dari responden mengenai kinerja pemerintah daerah pada SKPD di Kota Tasikmalaya lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.3 sampai dengan Tabel 4.17 yang berisikan tanggapan-tanggapan sebagai berikut:

Tabel 4.3
Jawaban Responden Mengenai Perumusan Kebijakan Yang Melibatkan Masyarakat

Kriteria	Skor Item	Jumlah Responden	Jumlah Skor	Presentase
Selalu	5	28	140	51,5
Sering	4	16	64	23,5
Kadang-kadang	3	19	57	21,0
Jarang	2	2	4	1,5
Tidak Pernah	1	7	7	2,6
Jumlah		72	272	100

Sumber: Data Diolah Peneliti

Dalam Tabel 4.3 memberikan informasi yaitu 28 responden (51,5%), 16 responden (23,5%), 19 responden (21,0%), 2 responden (1,5%), dan 7 responden (2,6%). Total item skor mengenai pernyataan di atas sebesar 272 (klasifikasi baik). Hal ini menunjukkan bahwa 75% responden melibatkan partisipasi

masyarakat dalam perumusan kebijakan dan 25,0% responden tidak begitu melibatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan.

Tabel 4.4
Jawaban Responden Mengenai Memadainya Peraturan OPD Yang Telah Dibuat Untuk Mengatur Bidang Urusan Tugas Dan Kewenangan

Kriteria	Skor Item	Jumlah Responden	Jumlah Skor	Presentase
Selalu	5	43	215	65,7
Sering	4	25	100	30,6
Kadang-kadang	3	4	12	3,7
Jarang	2	0	0	0,0
Tidak Pernah	1	0	0	0,0
Jumlah		72	327	100

Sumber: Data Diolah Peneliti

Dalam Tabel 4.4 memberikan informasi yaitu 43 responden (65,7%), 25 responden (30,6%), dan 4 responden (3,7%). Total item skor mengenai pernyataan di atas sebesar 327 (klasifikasi sangat baik). Hal ini menunjukkan bahwa 96,3% responden telah memadai dalam peraturan OPD yang dibuatnya untuk mengatur bidang tugas dan 3,7% responden belum begitu memadai dalam peraturan OPD yang dibuatnya.

Tabel 4.5
Jawaban Responden Mengenai Konsisten Dalam Menaati Aturan-aturan Yang Berlaku

Kriteria	Skor Item	Jumlah Responden	Jumlah Skor	Presentase
Selalu	5	62	310	88,8
Sering	4	9	36	10,3
Kadang-kadang	3	1	3	0,9
Jarang	2	0	0	0,0
Tidak Pernah	1	0	0	0,0
Jumlah		72	349	100

Sumber: Data Diolah Peneliti

Dalam Tabel 4.5 memberikan informasi yaitu 62 responden (88,8%), 9 responden (10,3%), dan 1 responden (0,9%). Total item skor mengenai pernyataan di atas sebesar 349 (klasifikasi sangat baik). Hal ini menunjukkan bahwa 99,1% responden selalu konsisten untuk menaati aturan yang berlaku dan 0,9% responden belum konsisten untuk menaati aturan yang berlaku.

Tabel 4.6
Jawaban Responden Mengenai Informasi Penyusunan Rencana Kerja Yang Memadai

Kriteria	Skor Item	Jumlah Responden	Jumlah Skor	Presentase
Selalu	5	44	220	66,5
Sering	4	27	108	32,6
Kadang-kadang	3	1	3	0,9
Jarang	2	0	0	0,0
Tidak Pernah	1	0	0	0,0
Jumlah		72	331	100

Sumber: Data Diolah Peneliti

Dalam Tabel 4.6 memberikan informasi yaitu 44 responden (66,5%), 27 responden (32,6%), dan 1 responden (0,9%). Total item skor mengenai pernyataan di atas sebesar 331 (klasifikasi sangat baik). Hal ini menunjukkan bahwa 99,1% responden dalam informasi penyusunan rencana kerja sudah memadai dan 0,9% responden belum begitu memadai terkait informasi penyusunan rencana kerja.

Tabel 4.7
Jawaban Responden Mengenai Memadainya Mekanisme Publik Dalam Mengakses Informasi Publik

Kriteria	Skor Item	Jumlah Responden	Jumlah Skor	Presentase
Selalu	5	35	175	55,6
Sering	4	29	116	36,8
Kadang-kadang	3	8	24	7,6

Jarang	2	0	0	0,0
Tidak Pernah	1	0	0	0,0
Jumlah		72	315	100

Sumber: Data Diolah Peneliti

Dalam Tabel 4.7 memberikan informasi yaitu 35 responden (55,6%), 29 responden (36,8%), dan 8 responden (7,6%). Total item skor mengenai pernyataan di atas sebesar 315 (klasifikasi sangat baik). Hal ini menunjukkan bahwa 92,4% responden dalam mengakses informasi publik sudah memadai dan 7,6% responden dalam mengakses informasi publik kurang memadai.

Tabel 4.8
Jawaban Responden Mengenai Ketertiban Masyarakat Dalam Menyampaikan Pengaduan Dengan Menggunakan Forum Yang Disediakan

Kriteria	Skor Item	Jumlah Responden	Jumlah Skor	Presentase
Selalu	5	23	115	39,4
Sering	4	30	120	41,1
Kadang-kadang	3	19	57	19,5
Jarang	2	0	0	0,0
Tidak Pernah	1	0	0	0,0
Jumlah		72	292	100

Sumber: Data Diolah Peneliti

Dalam Tabel 4.8 memberikan informasi yaitu 23 responden (39,4%), 30 responden (41,1%), dan 19 responden (19,5%). Total item skor mengenai pernyataan di atas sebesar 292 (klasifikasi baik). Hal ini menunjukkan bahwa 80,5% responden beranggapan masyarakat selalu tertib dalam menyampaikan pengaduan forum dan 19,5% responden beranggapan masyarakat kurang tertib dalam menyampaikan pengaduan forum.

Tabel 4.9
Jawaban Responden Mengenai Penyelesaian Berbagai Pengaduan Dari Masyarakat

Kriteria	Skor Item	Jumlah Responden	Jumlah Skor	Presentase
Selalu	5	35	175	54,7
Sering	4	34	136	42,5
Kadang-kadang	3	3	9	2,8
Jarang	2	0	0	0,0
Tidak Pernah	1	0	0	0,0
Jumlah		72	320	100

Sumber: Data Diolah Peneliti

Dalam Tabel 4.9 memberikan informasi yaitu 35 responden (54,7%), 34 responden (42,5%), dan 3 responden (2,8%). Total item skor mengenai pernyataan di atas sebesar 320 (klasifikasi sangat baik). Hal ini menunjukkan bahwa 97,2% responden sudah menyelesaikan berbagai pengaduan dari masyarakat dengan baik dan 2,8% responden menyelesaikan berbagai pengaduan dari masyarakat dengan kurang baik.

Tabel 4.10
Jawaban Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas Yang Dilakukan Secara Bersama Dan Terkoordinir

Kriteria	Skor Item	Jumlah Responden	Jumlah Skor	Presentase
Selalu	5	46	230	69,1
Sering	4	25	100	30,0
Kadang-kadang	3	1	3	0,9
Jarang	2	0	0	0,0
Tidak Pernah	1	0	0	0,0
Jumlah		72	333	100

Sumber: Data Diolah Peneliti

Dalam Tabel 4.10 memberikan informasi yaitu 46 responden (69,1%), 25 responden (30%), dan 1 responden (0,9%). Total item skor mengenai pernyataan di atas sebesar 333 (klasifikasi sangat baik). Hal ini menunjukkan bahwa 99,1% responden dalam pelaksanaan tugas sudah terkoordinir dan 0,9% responden dalam pelaksanaan tugas kurang terkoordinir.

Tabel 4.11
Jawaban Responden Mengenai Sumber Daya Pemberdayaan Publik Yang Memadai

Kriteria	Skor Item	Jumlah Responden	Jumlah Skor	Presentase
Selalu	5	25	125	42,4
Sering	4	31	124	42,0
Kadang-kadang	3	15	45	15,3
Jarang	2	0	0	0,0
Tidak Pernah	1	1	1	0,3
Jumlah		72	295	100

Sumber: Data Diolah Peneliti

Dalam Tabel 4.11 memberikan informasi yaitu 25 responden (42,4%), 31 responden (42%), 15 responden (15,3%), dan 1 responden (0,3%). Total item skor mengenai pernyataan di atas sebesar 295 (klasifikasi baik). Hal ini menunjukkan bahwa 84,4% responden telah memadainya sumber daya pemberdayaan publik dan 15,6% responden belum memadainya sumber daya pemberdayaan publik.

Tabel 4.12
Jawaban Responden Mengenai Penggunaan Sumber Daya Yang Efisien
Mampu Mencegah Defisit Anggaran

Kriteria	Skor Item	Jumlah Responden	Jumlah Skor	Presentase
Selalu	5	30	150	49,8
Sering	4	29	116	38,5
Kadang-kadang	3	11	33	11,0
Jarang	2	0	0	0,0
Tidak Pernah	1	2	2	0,7
Jumlah		72	301	100

Sumber: Data Diolah Peneliti

Dalam Tabel 4.12 memberikan informasi yaitu 30 responden (49,8%), 29 responden (38,5%), 11 responden (11%), dan 2 responden (0,7%). Total item skor mengenai pernyataan di atas sebesar 301 (klasifikasi baik). Hal ini menunjukkan bahwa 88,4% responden dalam penggunaan sumber daya yang efisien mampu mencegah defisit anggaran dan 11,6% responden dalam penggunaan sumber daya yang efisien tidak mampu mencegah defisit anggaran.

Tabel 4.13
Jawaban Responden Mengenai Adanya Kesesuaian Antara Pelaksanaan
Dengan Standar Prosedur Pelaksanaan

Kriteria	Skor Item	Jumlah Responden	Jumlah Skor	Presentase
Selalu	5	35	175	54,5
Sering	4	35	140	43,6
Kadang-kadang	3	2	6	1,9
Jarang	2	0	0	0,0
Tidak Pernah	1	0	0	0,0
Jumlah		72	321	100

Sumber: Data Diolah Peneliti

Dalam Tabel 4.13 memberikan informasi yaitu 35 responden (54,5%), 35 responden (43,6%), dan 2 responden (1,9%). Total item skor mengenai pernyataan di atas sebesar 321 (klasifikasi sangat baik). Hal ini menunjukkan bahwa 98,1% responden selalu sesuai antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan dan 1,9% responden belum sesuai antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.

Tabel 4.14
Jawaban Responden Mengenai Diperlukannya Mekanisme *Reward* Dan *Punishment* Untuk Menunjang Pelaksanaan Akuntabilitas

Kriteria	Skor Item	Jumlah Responden	Jumlah Skor	Presentase
Selalu	5	23	115	40,1
Sering	4	30	120	41,8
Kadang-kadang	3	16	48	16,7
Jarang	2	1	2	0,7
Tidak Pernah	1	2	2	0,7
Jumlah		72	287	100

Sumber: Data Diolah Peneliti

Dalam Tabel 4.14 memberikan informasi yaitu 23 responden (40,1%), 30 responden (41,8%), 16 responden (16,7%), 1 responden (0,7%) dan 2 responden (0,7%). Total item skor mengenai pernyataan di atas sebesar 287 (klasifikasi baik). Hal ini menunjukkan bahwa 81,9% responden selalu memerlukan mekanisme *reward punishment* untuk menunjang akuntabilitas dan 18,1% responden tidak pernah memerlukan mekanisme *reward punishment* untuk menunjang akuntabilitas.

Tabel 4.15
Jawaban Responden Mengenai Relevannya Antara Visi Misi Dengan Potensi Yang Dimiliki

Kriteria	Skor Item	Jumlah Responden	Jumlah Skor	Presentase
Selalu	5	34	170	54,8
Sering	4	30	120	38,7
Kadang-kadang	3	6	18	5,8
Jarang	2	0	0	0,0
Tidak Pernah	1	2	2	0,6
Jumlah		72	310	100

Sumber: Data Diolah Peneliti

Dalam Tabel 4.15 memberikan informasi yaitu 34 responden (54,8%), 30 responden (38,7%), 6 responden (5,8%), dan 2 responden (0,6%). Total item skor mengenai pernyataan di atas sebesar 310 (klasifikasi sangat baik). Hal ini menunjukkan bahwa 93,5% responden selalu relevan antara visi misi dengan potensi yang dimiliki dan 6,5% responden tidak relevan antara visi misi dengan potensi yang dimiliki.

Tabel 4.16
Jawaban Responden Mengenai Adanya Kesesuaian Antara Pencapaian Visi Misi Dengan Tujuan Yang Telah Direncanakan

Kriteria	Skor Item	Jumlah Responden	Jumlah Skor	Presentase
Selalu	5	43	215	66,2
Sering	4	23	92	28,3
Kadang-kadang	3	6	18	5,5
Jarang	2	0	0	0,0
Tidak Pernah	1	0	0	0,0
Jumlah		72	325	100

Sumber: Data Diolah Peneliti

Dalam Tabel 4.16 memberikan informasi yaitu 43 responden (66,2%), 23 responden (28,3%), dan 6 responden (5,5%). Total item skor mengenai pernyataan di atas sebesar 325 (klasifikasi sangat baik). Hal ini menunjukkan bahwa 94,5% responden selalu sesuai antara pencapaian visi misi dengan tujuan yang direncanakan dan 5,5% responden kurang sesuai antara pencapaian visi misi dengan tujuan yang direncanakan.

Tabel 4.17

Jawaban Responden Mengenai Visi Dan Misi Realistis Untuk Diwujudkan

Kriteria	Skor Item	Jumlah Responden	Jumlah Skor	Presentase
Selalu	5	37	185	57,8
Sering	4	30	120	37,5
Kadang-kadang	3	5	15	4,7
Jarang	2	0	0	0,0
Tidak Pernah	1	0	0	0,0
Jumlah		72	320	100

Sumber: Data Diolah Peneliti

Dalam Tabel 4.16 memberikan informasi yaitu 37 responden (57,8%), 30 responden (37,5%), dan 5 responden (4,7%). Total item skor mengenai pernyataan di atas sebesar 320 (klasifikasi sangat baik). Hal ini menunjukkan bahwa 95,3% responden selalu realistis dalam mewujudkan visi misi dan 4,7% responden belum realistis dalam mewujudkan visi misi.

Di bawah ini adalah hasil total dari rekapitulasi keseluruhan variabel *Good Governance*.

Tabel 4.18
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai *Good Governance*

No	Pernyataan	Skor yang ditargetkan	Skor yang diperoleh	Kategori
1	Perumusan kebijakan yang melibatkan masyarakat	360	272	Baik
2	Memadainya peraturan OPD yang telah dibuat untuk mengatur bidang urusan tugas dan kewenangan	360	327	Sangat Baik
3	Konsisten dalam menaati aturan-aturan yang berlaku	360	349	Sangat Baik
4	Informasi penyusunan rencana kerja yang memadai	360	331	Sangat Baik
5	Memadainya mekanisme publik dalam mengakses informasi publik	360	315	Sangat Baik
6	Ketertiban masyarakat dalam menyampaikan pengaduan dengan menggunakan forum yang disediakan	360	292	Baik
7	Penyelesaian berbagai pengaduan dari masyarakat	360	320	Sangat Baik
8	Pelaksanaan tugas yang dilakukan secara bersama dan terkoordinir	360	333	Sangat Baik
9	Sumber daya pemberdayaan publik yang memadai	360	295	Baik
10	Penggunaan sumber daya yang efisien mampu mencegah defisit anggaran	360	301	Baik
11	Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan	360	321	Sangat Baik
12	Diperlukannya mekanisme <i>reward</i> dan <i>punishment</i> untuk menunjang pelaksanaan akuntabilitas	360	287	Baik
13	Relevannya antara visi misi dengan potensi yang dimiliki	360	310	Sangat Baik
14	Adanya kesesuaian antara pencapaian visi misi dengan tujuan yang telah direncanakan	360	325	Sangat Baik
15	Visi dan misi realistis untuk diwujudkan	360	320	Sangat Baik
	Total	5.400	4.698	

Sumber: Data Diolah Peneliti

Untuk menyederhanakan interpretasi dari setiap tanggapan responden, penulis mengacu pada kriteria yang dikemukakan oleh Sugiyono (2007: 152) dengan prosedur sebagai berikut:

1. Menentukan nilai tertinggi dari setiap indikator

$$\text{Nilai tertinggi dari setiap indikator} \quad 72 \times 5 \times 15 = 5.400$$

2. Menentukan nilai terendah dari setiap indikator

$$\text{Nilai terendah dari setiap indikator} \quad 72 \times 1 \times 15 = 1.080$$

3. Menentukan jumlah kriteria pernyataan = 5

4. Menentukan panjang interval: rasio selisih nilai tertinggi dan nilai terendah dengan kriteria pernyataan.

$$NJII = \frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Jumlah Kriteria Pertanyaan}} = \frac{5.400 - 1.080}{5} = 864$$

5. Melakukan penentuan untuk klasifikasi penilaian sebagai berikut:

Tabel 4.19
Klasifikasi Kriteria Tanggapan Responden *Good Governance*

Interval	Keterangan
1.080 – 1.943	Sangat Buruk
1.944 – 2.807	Buruk
2.808 – 3.671	Cukup Baik
3.672 – 4.535	Baik
4.536 – 5.400	Sangat Baik

Sumber: Data Diolah Peneliti

Dari hasil penelitian di atas pada rekapitulasi pernyataan dikemukakan bahwa nilai yang diperoleh dari perhitungan terhadap responden mengenai variabel *good governnace* yang terdiri dari 15 pernyataan dan total skor yang diperoleh yaitu 4.698 menunjukkan kategori sangat baik. Namun ada beberapa

indikator yang masih memiliki kategori baik, diantara indikator-indikator tersebut juga masih terdapat indikator yang memiliki nilai terendah yaitu pada pernyataan nomor 1 mengenai keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan. Dengan skor yang diperoleh 272.

4.1.2.2 Sistem Pengendalian Intern pada SKPD Kota Tasikmalaya

Untuk lebih jelasnya mengenai cara perolehan data yaitu salah satunya dengan cara menyebarkan kuesioner yang terdiri dari daftar pernyataan-pernyataan yang telah disajikan dalam bentuk kuesioner. Adapun kuesioner tersebut diberikan kepada 36 SKPD Kota Tasikmalaya yang menjadi sampel penelitian, setiap variabel dibagi kepada beberapa responden per instansi. Pada variabel (X_2) yaitu mengenai sistem pengendalian intern pemerintah diisi oleh pegawai yang berkaitan dengan sekretaris dan keuangan.

Untuk mengetahui jawaban dari responden mengenai kinerja pemerintah daerah pada SKPD di Kota Tasikmalaya lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.20 sampai dengan Tabel 4.26 yang berisikan tanggapan-tanggapan sebagai berikut:

Tabel 4.20
Jawaban Responden Mengenai Instansi Telah Berintegritas Dan Memiliki Nilai Etika

Kriteria	Skor Item	Jumlah Responden	Jumlah Skor	Presentase
Selalu	5	45	225	68,0
Sering	4	25	100	30,2
Kadang-kadang	3	2	6	1,8
Jarang	2	0	0	0,0
Tidak Pernah	1	0	0	0,0

Jumlah		72	331	100
---------------	--	-----------	------------	------------

Sumber: Data Diolah Peneliti

Dalam Tabel 4.20 memberikan informasi yaitu 45 responden (68%), 25 responden (30,2%), dan 2 responden (1,8%). Total item skor mengenai pernyataan di atas sebesar 331 (klasifikasi sangat baik). Hal ini menunjukkan bahwa 98,2% responden selalu berintegritas pada nilai etika dan 1,8% responden kurang berintegritas pada nilai etika.

Tabel 4.21

Jawaban Responden Mengenai Pimpinan Melakukan Analisis Risiko Secara Lengkap Dan Menyeluruh Terhadap Kemungkinan Timbulnya Pelanggaran Pada Sistem Akuntansi

Kriteria	Skor Item	Jumlah Responden	Jumlah Skor	Presentase
Selalu	5	36	180	56,1
Sering	4	33	132	41,1
Kadang-kadang	3	3	9	2,8
Jarang	2	0	0	0,0
Tidak Pernah	1	0	0	0,0
Jumlah		72	321	100

Sumber: Data Diolah Peneliti

Dalam Tabel 4.21 memberikan informasi yaitu 36 responden (56,1%), 33 responden (41,1%), dan 3 responden (2,8%). Total item skor mengenai pernyataan di atas sebesar 321 (klasifikasi sangat baik). Hal ini menunjukkan bahwa 97,2% responden selalu melakukan analisis risiko secara menyeluruh untuk menghindari pelanggaran sistem akuntansi dan 2,8% responden tidak melakukan analisis risiko secara menyeluruh.

Tabel 4.22
Jawaban Responden Mengenai Adanya Penentuan Batas Dan Penetapan
Dalam Toleransi Risiko

Kriteria	Skor Item	Jumlah Responden	Jumlah Skor	Presentase
Selalu	5	34	170	54,7
Sering	4	27	108	34,7
Kadang-kadang	3	11	33	10,6
Jarang	2	0	0	0,0
Tidak Pernah	1	0	0	0,0
Jumlah		72	311	100

Sumber: Data Diolah Peneliti

Dalam Tabel 4.22 memberikan informasi yaitu 34 responden (54,7%), 27 responden (34,7%), dan 11 responden (10,6%). Total item skor mengenai pernyataan di atas sebesar 311 (klasifikasi sangat baik). Hal ini menunjukkan bahwa 89,4% responden telah melakukan penentuan batas dalam toleransi risiko dan 10,6% responden tidak telah melakukan penentuan batas dalam toleransi risiko.

Tabel 4.23
Jawaban Responden Mengenai Sistem Informasi Berjalan Dengan Efektif
Dan Efisien

Kriteria	Skor Item	Jumlah Responden	Jumlah Skor	Presentase
Selalu	5	37	185	57,5
Sering	4	32	128	39,8
Kadang-kadang	3	3	9	2,8
Jarang	2	0	0	0,0
Tidak Pernah	1	0	0	0,0
Jumlah		72	322	100

Sumber: Data Diolah Peneliti

Dalam Tabel 4.23 memberikan informasi yaitu 37 responden (57,5%), 32 responden (39,8%), dan 3 responden (2,8%). Total item skor mengenai pernyataan di atas sebesar 322 (klasifikasi sangat baik). Hal ini menunjukkan bahwa 97,2% responden terkait sistem informasi telah berjalan efektif dan 2,8% responden terkait sistem informasi belum berjalan efektif.

Tabel 4.24
Jawaban Responden Mengenai Dilakukannya Pengendalian Fisik Atas Aktiva Dan Catatan

Kriteria	Skor Item	Jumlah Responden	Jumlah Skor	Presentase
Selalu	5	39	195	60,4
Sering	4	29	116	35,9
Kadang-kadang	3	4	12	3,7
Jarang	2	0	0	0,0
Tidak Pernah	1	0	0	0,0
Jumlah		72	323	100

Sumber: Data Diolah Peneliti

Dalam Tabel 4.24 memberikan informasi yaitu 39 responden (60,4%), 29 responden (35,9%), dan 4 responden (3,7%). Total item skor mengenai pernyataan di atas sebesar 323 (klasifikasi sangat baik). Hal ini menunjukkan bahwa 96,3% responden selalu melakukan pengendalian fisik atas aktiva catatan dan 3,7% responden tidak begitu sering melakukan pengendalian fisik atas aktiva catatan.

Tabel 4.25
Jawaban Responden Mengenai Pemantauan Di Instansi Dilakukan Secara Periodik

Kriteria	Skor Item	Jumlah Responden	Jumlah Skor	Presentase
Selalu	5	50	250	74,2
Sering	4	21	84	24,9
Kadang-kadang	3	1	3	0,9
Jarang	2	0	0	0,0
Tidak Pernah	1	0	0	0,0
Jumlah		72	337	100

Sumber: Data Diolah Peneliti

Dalam Tabel 4.25 memberikan informasi yaitu 50 responden (74,2%), 21 responden (24,9%), dan 1 responden (0,9%). Total item skor mengenai pernyataan di atas sebesar 337 (klasifikasi sangat baik). Hal ini menunjukkan bahwa 99,1% responden melakukan pemantauan secara periodik dan 0,9% responden belum melakukan pemantauan secara periodik.

Tabel 4.26
Jawaban Responden Mengenai Pemantauan Dilakukan Untuk Menilai Kualitas Dalam Pengendalian Internal

Kriteria	Skor Item	Jumlah Responden	Jumlah Skor	Presentase
Selalu	5	44	220	67,1
Sering	4	24	96	29,3
Kadang-kadang	3	4	12	3,7
Jarang	2	0	0	0,0
Tidak Pernah	1	0	0	0,0
Jumlah		72	328	100

Sumber: Data Diolah Peneliti

Dalam Tabel 4.26 memberikan informasi yaitu 44 responden (67,1%), 24 responden (29,3%), dan 4 responden (3,7%). Total item skor mengenai

pernyataan di atas sebesar 328 (klasifikasi sangat baik). Hal ini menunjukkan bahwa 96,3% responden telah melakukan pemantauan untuk menilai kualitas pengendalian internal dan 3,7% responden kurang melakukan pemantauan untuk menilai kualitas pengendalian internal.

Di bawah ini adalah hasil total dari rekapitulasi keseluruhan variabel sistem pengendalian intern pemerintah.

Tabel 4.27
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

No	Pernyataan	Skor yang ditargetkan	Skor yang diperoleh	Kategori
1	Instansi telah berintegritas dan memiliki nilai etika	360	331	Sangat Baik
2	Pimpinan melakukan analisis risiko secara lengkap dan menyeluruh terhadap kemungkinan timbulnya pelanggaran pada sistem akuntansi	360	321	Sangat Baik
3	Adanya penentuan batas dan penetapan dalam toleransi risiko	360	311	Sangat Baik
4	Sistem informasi berjalan dengan efektif dan efisien	360	322	Sangat Baik
5	Dilakukannya pengendalian fisik atas aktiva dan catatan	360	323	Sangat Baik
6	Pemantauan di instansi dilakukan secara periodik	360	337	Sangat Baik
7	Pemantauan dilakukan untuk menilai kualitas dalam pengendalian internal	360	328	Sangat Baik
	Total	2.520	2.273	

Sumber: Data Diolah Peneliti

Untuk menyederhanakan interpretasi dari setiap tanggapan responden, penulis mengacu pada kriteria yang dikemukakan oleh Sugiyono (2007: 152) dengan prosedur sebagai berikut:

1. Menentukan nilai tertinggi dari setiap indikator

$$\text{Nilai tertinggi dari setiap indikator} \quad 72 \times 5 \times 7 \quad = 2.520$$

2. Menentukan nilai terendah dari setiap indikator

$$\text{Nilai terendah dari setiap indikator} \quad 72 \times 1 \times 7 \quad = 504$$

3. Menentukan jumlah kriteria pernyataan = 5

4. Menentukan panjang interval: rasio selisih nilai tertinggi dan nilai terendah dengan kriteria pernyataan.

$$NJl = \frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Jumlah Kriteria Pertanyaan}} = \frac{2.520 - 504}{5} = 403,2 = 403$$

5. Melakukan penentuan untuk klasifikasi penilaian sebagai berikut:

Tabel 4.28
Klasifikasi Kriteria Tanggapan Responden SPIP

Interval	Keterangan
504 – 906	Sangat Buruk
907 – 1.309	Buruk
1.310 – 1.712	Cukup Baik
1.713 – 2.115	Baik
2.116 – 2.520	Sangat Baik

Sumber: Data Diolah Peneliti

Dari hasil penelitian di atas pada rekapitulasi pernyataan dikemukakan bahwa nilai yang diperoleh dari perhitungan terhadap responden mengenai variabel sistem pengendalian intern pemerintah yang terdiri dari 7 pernyataan dan total skor yang diperoleh yaitu 2.273 menunjukkan kategori sangat baik. Namun ada beberapa indikator yang memiliki nilai terendah, diantaranya yaitu pada pernyataan nomor 3 mengenai adanya penentuan batas dan penetapan dalam toleransi risiko. Dengan skor yang diperoleh 311.

4.1.2.3 Kinerja Pemerintah Daerah pada SKPD Kota Tasikmalaya

Adapun dalam memperoleh data dengan cara menyebarkan kuesioner tersebut kepada 36 SKPD yang ada di Kota Tasikmalaya sebagai responden penelitian, setiap variabel dibagikan kepada beberapa responden. Pada variabel (Y) yaitu tentang kinerja pemerintah daerah diisi oleh pegawai yang berkaitan dengan sekretaris dan keuangan.

Untuk mengetahui jawaban dari responden mengenai kinerja pemerintah daerah pada SKPD di Kota Tasikmalaya lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.29 sampai dengan Tabel 4.35 yang berisikan tanggapan-tanggapan sebagai berikut:

Tabel 4.29
Jawaban Responden Mengenai Tercapainya Target Kinerja Kegiatan Dari Program Yang Telah Direncanakan

Kriteria	Skor Item	Jumlah Responden	Jumlah Skor	Presentase
Selalu	5	36	180	56,6
Sering	4	30	120	37,7
Kadang-kadang	3	6	18	5,7
Jarang	2	0	0	0,0
Tidak Pernah	1	0	0	0,0
Jumlah		72	318	100

Sumber: Data Diolah Peneliti

Dalam Tabel 4.29 memberikan informasi yaitu 36 responden (56,6%), 30 responden (37,7%), dan 6 responden (5,7%). Total item skor mengenai pernyataan di atas sebesar 318 (klasifikasi sangat baik). Hal ini menunjukkan bahwa 94,3% responden telah mencapai target kinerja kegiatan dari program yang

direncanakan dan 5,7% responden belum mencapai target kinerja kegiatan dari program yang direncanakan.

Tabel 4.30
Jawaban Responden Mengenai Ketepatan Kesesuaian Antara Hasil Kegiatan Dengan Program Kerja Yang Telah Direncanakan

Kriteria	Skor Item	Jumlah Responden	Jumlah Skor	Presentase
Selalu	5	29	145	46,5
Sering	4	39	156	50,0
Kadang-kadang	3	3	9	2,9
Jarang	2	1	2	0,6
Tidak Pernah	1	0	0	0,0
Jumlah		72	312	100

Sumber: Data Diolah Peneliti

Dalam Tabel 4.30 memberikan informasi yaitu 29 responden (46,5%), 39 responden (50%), 3 responden (2,9%), dan 1 responden (0,6%). Total item skor mengenai pernyataan di atas sebesar 312 (klasifikasi sangat baik). Hal ini menunjukkan bahwa 96,5% responden selalu sesuai antara hasil dan program kerja yang direncanakan dan 3,5% responden kurang sesuai antara hasil dan program kerja yang direncanakan.

Tabel 4.31
Jawaban Responden Mengenai Tingkat Pencapaian Program Kerja Yang Ditetapkan Berjalan Maksimal

Kriteria	Skor Item	Jumlah Responden	Jumlah Skor	Presentase
Selalu	5	32	160	50,6
Sering	4	36	144	45,6
Kadang-kadang	3	4	12	3,8
Jarang	2	0	0	0,0
Tidak Pernah	1	0	0	0,0

Jumlah		72	316	100
---------------	--	-----------	------------	------------

Sumber: Data Diolah Peneliti

Dalam Tabel 4.31 memberikan informasi yaitu 32 responden (50,6%), 36 responden (45,6%), dan 4 responden (3,8%). Total item skor mengenai pernyataan di atas sebesar 316 (klasifikasi sangat baik). Hal ini menunjukkan bahwa 96,2% responden selalu berjalan maksimal dalam pencapaian program kerja dan 3,8% responden belum berjalan maksimal dalam pencapaian program kerja.

Tabel 4.32

Jawaban Responden Mengenai Dampak Yang Dirasakan Masyarakat Atas Hasil Kegiatan Atau Program Kerja Yang Telah Dilakukan

Kriteria	Skor Item	Jumlah Responden	Jumlah Skor	Presentase
Selalu	5	26	130	42,3
Sering	4	39	156	50,8
Kadang-kadang	3	7	21	6,8
Jarang	2	0	0	0,0
Tidak Pernah	1	0	0	0,0
Jumlah		72	307	100

Sumber: Data Diolah Peneliti

Dalam Tabel 4.32 memberikan informasi yaitu 26 responden (42,3%), 39 responden (50,8%), dan 7 responden (6,8%). Total item skor mengenai pernyataan di atas sebesar 307 (klasifikasi sangat baik). Hal ini menunjukkan bahwa 93,2% responden selalu memberikan dampak kepada masyarakat atas hasil program kerja dan 6,8% responden tidak memberikan dampak kepada masyarakat atas hasil program kerja.

Tabel 4.33
Jawaban Responden Mengenai Kesesuaian Antara Realisasi Anggaran Dengan Anggaran Yang Ditetapkan Untuk Pelaksanaan Program Kerja

Kriteria	Skor Item	Jumlah Responden	Jumlah Skor	Presentase
Selalu	5	38	190	59,2
Sering	4	29	116	36,1
Kadang-kadang	3	5	15	4,7
Jarang	2	0	0	0,0
Tidak Pernah	1	0	0	0,0
Jumlah		72	321	100

Sumber: Data Diolah Peneliti

Dalam Tabel 4.33 memberikan informasi yaitu 38 responden (59,2%), 29 responden (36,1%), dan 5 responden (4,7%). Total item skor mengenai pernyataan di atas sebesar 321 (klasifikasi sangat baik). Hal ini menunjukkan bahwa 95,3% responden telah sesuai antara realisasi anggaran dengan anggaran yang ditetapkan dan 4,7% responden kurang sesuai antara realisasi anggaran dengan anggaran yang ditetapkan.

Tabel 4.34
Jawaban Responden Mengenai Kesesuaian Antara Pencapaian Realisasi Belanja Dengan Standar Belanja

Kriteria	Skor Item	Jumlah Responden	Jumlah Skor	Presentase
Selalu	5	46	230	70,6
Sering	4	22	88	27,0
Kadang-kadang	3	2	6	1,8
Jarang	2	0	0	0,0
Tidak Pernah	1	2	2	0,6
Jumlah		72	326	100

Sumber: Data Diolah Peneliti

Dalam Tabel 4.34 memberikan informasi yaitu 46 responden (70,6%), 22 responden (27%), dan 2 responden (1,8%). Total item skor mengenai pernyataan di atas sebesar 326 (klasifikasi sangat baik). Hal ini menunjukkan bahwa 97,5% responden selalu sesuai antara pencapaian realisasi belanja dengan standar belanja dan 2,5% responden tidak pernah sesuai antara pencapaian realisasi belanja dengan standar belanja.

Tabel 4.35
Jawaban Responden Mengenai Moral Yang Diterapkan Pegawai Instansi Sudah Baik Terhadap Pencapaian Kinerja

Kriteria	Skor Item	Jumlah Responden	Jumlah Skor	Presentase
Selalu	5	42	210	64,0
Sering	4	28	112	34,1
Kadang-kadang	3	2	6	1,8
Jarang	2	0	0	0,0
Tidak Pernah	1	0	0	0,0
Jumlah		72	328	100

Sumber: Data Diolah Peneliti

Dalam Tabel 4.35 memberikan informasi yaitu 42 responden (64%), 28 responden (34,1%), dan 2 responden (1,8%). Total item skor mengenai pernyataan di atas sebesar 328 (klasifikasi sangat baik). Hal ini menunjukkan bahwa 98,2% responden selalu menerapkan moral yang baik terhadap pencapaian kinerja dan 1,8% responden kurang menerapkan moral yang baik terhadap pencapaian kinerja.

Di bawah ini adalah hasil total dari rekapitulasi keseluruhan variabel sistem pengendalian intern pemerintah.

Tabel 4.36

Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Kinerja Pemerintah Daerah

No	Pernyataan	Skor yang ditargetkan	Skor yang diperoleh	Kategori
1	Tercapainya target kinerja kegiatan dari program yang telah direncanakan	360	318	Sangat Baik
2	Ketepatan kesesuaian antara hasil kegiatan dengan program kerja yang telah direncanakan	360	312	Sangat Baik
3	Tingkat pencapaian program kerja yang ditetapkan berjalan maksimal	360	316	Sangat Baik
4	Dampak yang dirasakan masyarakat atas hasil kegiatan atau program kerja yang telah dilakukan	360	307	Sangat Baik
5	Kesesuaian antara realisasi anggaran dengan anggaran yang ditetapkan untuk pelaksanaan program kerja	360	321	Sangat Baik
6	Kesesuaian antara pencapaian realisasi belanja dengan standar belanja	360	326	Sangat Baik
7	Moral yang diterapkan pegawai instansi sudah baik terhadap pencapaian kinerja	360	328	Sangat Baik
	Total	2520	2.228	

Sumber: Data Diolah Peneliti

Untuk menyederhanakan interpretasi dari setiap tanggapan responden, penulis mengacu pada kriteria yang dikemukakan oleh Sugiyono (2007: 152) dengan prosedur sebagai berikut:

1. Menentukan nilai tertinggi dari setiap indikator

$$\text{Nilai tertinggi dari setiap indikator} \quad 72 \times 5 \times 7 = 2.520$$

2. Menentukan nilai terendah dari setiap indikator

$$\text{Nilai terendah dari setiap indikator} \quad 72 \times 1 \times 7 = 504$$

3. Menentukan jumlah kriteria pernyataan = 5

4. Menentukan panjang interval: rasio selisih nilai tertinggi dan nilai terendah dengan kriteria pernyataan.

$$NJl = \frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Jumlah Kriteria Pertanyaan}} = \frac{2.520 - 504}{5} = 403,2 = 403$$

5. Melakukan penentuan untuk klasifikasi penilaian sebagai berikut:

Tabel 4.37
Klasifikasi Kriteria Tanggapan Responden Kinerja Pemerintah Daerah

Interval	Keterangan
504 – 906	Sangat Buruk
907 – 1.309	Buruk
1.310 – 1.712	Cukup Baik
1.713 – 2.115	Baik
2.116 – 2.520	Sangat Baik

Sumber: Data Diolah Peneliti

Dari hasil penelitian di atas pada rekapitulasi pernyataan dikemukakan bahwa nilai yang diperoleh dari perhitungan terhadap responden mengenai variabel sistem pengendalian intern pemerintah yang terdiri dari 7 pernyataan dan total skor yang diperoleh yaitu 2.228 menunjukkan kategori sangat baik. Namun ada beberapa indikator yang memiliki nilai terendah, diantaranya yaitu pada pernyataan nomor 4 mengenai dampak yang dirasakan masyarakat atas hasil kegiatan atau program kerja yang telah dilakukan. Dengan skor yang diperoleh 307.

4.2 Pembahasan

4.2.1 *Good Governance*, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Kinerja Pemerintah Daerah Pada SKPD Kota Tasikmalaya

1. *Good Governance* Pada SKPD Kota Tasikmalaya

Good governance memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah pada SKPD Kota Tasikmalaya. Semakin baik mekanisme pemerintahan dalam menjalankan fungsionalnya maka akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah pada SKPD Kota Tasikmalaya. Keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai tujuannya dapat dilihat dari kinerja yang telah dilakukan oleh organisasi tersebut. Kinerja organisasi sektor publik menggambarkan ukuran-ukuran mengenai telah terlaksananya tujuan atau visi yang telah ditetapkan berdasarkan strategi yang digunakan oleh organisasi. *Good governance* membuat keseimbangan kinerja antara pemerintahan sebagai pelayanan publiknya dalam pencapaian program. Pemerintah dapat menerapkan *good governance* untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena dengan adanya penerapan *good governance* secara maksimal maka akan meningkatkan efisien dan efektivitas dari pemakaian sumber daya yang ada pada setiap organisasi (Taufik dan Kamala, 2013). Masyarakat akan ikut merasakan jika kualitas pencapaian program kerja meningkat maka akan menilai bahwa kinerja pemerintah pun tergolong bagus. Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian Yang dan Suartana (2017) menyatakan bahwa *good governance* mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *good governance* yang diterapkan maka akan

semakin meningkat pula jalannya kinerja pemerintah daerah di Kota Tasikmalaya atau daerah lainnya.

Perumusan kebijakan yang melibatkan masyarakat memiliki klasifikasi baik. Hal ini menunjukkan bahwa 75% responden melibatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan dan 25,0% responden tidak begitu melibatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan.

Memadainya peraturan OPD yang telah dibuat untuk mengatur bidang urusan tugas dan kewenangan memiliki klasifikasi sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa 96,3% responden telah memadai dalam peraturan OPD yang dibuatnya untuk mengatur bidang tugas dan 3,7% responden belum begitu memadai dalam peraturan OPD yang dibuatnya.

Konsisten dalam menaati aturan-aturan yang berlaku memiliki klasifikasi sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa 99,1% responden selalu konsisten untuk menaati aturan yang berlaku dan 0,9% responden belum konsisten untuk menaati aturan yang berlaku.

Informasi penyusunan rencana kerja yang memadai memiliki klasifikasi sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa 99,1% responden dalam informasi penyusunan rencana kerja sudah memadai dan 0,9% responden belum begitu memadai terkait informasi penyusunan rencana kerja.

Memadainya mekanisme publik dalam mengakses informasi publik memiliki klasifikasi sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa 92,4% responden dalam mengakses informasi publik sudah memadai dan 7,6% responden dalam mengakses informasi publik kurang memadai.

Ketertiban masyarakat dalam menyampaikan pengaduan dengan menggunakan forum yang disediakan memiliki klasifikasi baik. Hal ini menunjukkan bahwa 80,5% responden beranggapan masyarakat selalu tertib dalam menyampaikan pengaduan forum dan 19,5% responden beranggapan masyarakat kurang tertib dalam menyampaikan pengaduan forum.

Penyelesaian berbagai pengaduan dari masyarakat memiliki klasifikasi sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa 97,2% responden sudah menyelesaikan berbagai pengaduan dari masyarakat dengan baik dan 2,8% responden menyelesaikan berbagai pengaduan dari masyarakat dengan kurang baik.

Pelaksanaan tugas yang dilakukan secara bersama dan terkoordinir memiliki klasifikasi sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa 99,1% responden dalam pelaksanaan tugas sudah terkoordinir dan 0,9% responden dalam pelaksanaan tugas kurang terkoordinir.

Sumber daya pemberdayaan publik yang memadai memiliki klasifikasi baik. Hal ini menunjukkan bahwa 84,4% responden telah memadainya sumber daya pemberdayaan publik dan 15,6% responden belum memadainya sumber daya pemberdayaan publik.

Penggunaan sumber daya yang efisien mampu mencegah defisit anggaran memiliki klasifikasi baik. Hal ini menunjukkan bahwa 88,4% responden dalam penggunaan sumber daya yang efisien mampu mencegah defisit anggaran dan 11,6% responden dalam penggunaan sumber daya yang efisien tidak mampu mencegah defisit anggaran.

Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan memiliki klasifikasi sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa 98,1% responden selalu sesuai antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan dan 1,9% responden belum sesuai antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.

Diperlukannya mekanisme *reward* dan *punishment* untuk menunjang pelaksanaan akuntabilitas memiliki klasifikasi baik. Hal ini menunjukkan bahwa 81,9% responden selalu memerlukan mekanisme *reward punishment* untuk menunjang akuntabilitas dan 18,1% responden tidak pernah memerlukan mekanisme *reward punishment* untuk menunjang akuntabilitas.

Relevannya antara visi misi dengan potensi yang dimiliki memiliki klasifikasi sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa 93,5% responden selalu relevan antara visi misi dengan potensi yang dimiliki dan 6,5% responden tidak relevan antara visi misi dengan potensi yang dimiliki.

Adanya kesesuaian antara pencapaian visi misi dengan tujuan yang telah direncanakan memiliki klasifikasi sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa 94,5% responden selalu sesuai antara pencapaian visi misi dengan tujuan yang direncanakan dan 5,5% responden kurang sesuai antara pencapaian visi misi dengan tujuan yang direncanakan.

Visi dan misi realistis untuk diwujudkan memiliki klasifikasi sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa 95,3% responden selalu realistis dalam mewujudkan visi misi dan 4,7% responden belum realistis dalam mewujudkan visi misi.

2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada SKPD Kota Tasikmalaya

Sistem pengendalian intern pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah pada SKPD Kota Tasikmalaya. Semakin baik pengendalian internal yang dilakukan dalam pelaksanaan program atau kegiatan pemerintahan maka akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah pada SKPD Kota Tasikmalaya. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan faktor penting dan diharapkan mampu mencegah pelaksanaan kegiatan yang kurang sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan adanya penerapan pengendalian intern, maka akan terciptanya pemerintahan yang ekonomis, efektif, dan efisien dalam instansi yang pada akhirnya akan tetap mengacu pada kinerja pemerintah. Penerapan sistem pengendalian intern yang baik dalam setiap unit atau divisi yang ada dalam organisasi dapat meningkatkan kinerja organisasi tersebut (Alfitriady et al., 2020). Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Kusuma (2021) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah. Pada penelitian ini diperkuat oleh Amran (2019) dengan hasil penelitian menyatakan bahwa pengendalian internal mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Hal tersebut diperjelas karena semakin penerapan sistem pengendalian internnya baik pada setiap unit atau divisi yang ada dalam organisasi maka dapat meningkatkan kinerja organisasi tersebut.

Instansi telah berintegritas dan memiliki nilai etika memiliki klasifikasi sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa 98,2% responden selalu berintegritas pada nilai etika dan 1,8% responden kurang berintegritas pada nilai etika.

Pimpinan melakukan analisis risiko secara lengkap dan menyeluruh terhadap kemungkinan timbulnya pelanggaran pada sistem akuntansi memiliki klasifikasi sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa 97,2% responden selalu melakukan analisis risiko secara menyeluruh untuk menghindari pelanggaran sistem akuntansi dan 2,8% responden tidak melakukan analisis risiko secara menyeluruh.

Adanya penentuan batas dan penetapan dalam toleransi risiko memiliki klasifikasi sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa 89,4% responden telah melakukan penentuan batas dalam toleransi risiko dan 10,6% responden tidak telah melakukan penentuan batas dalam toleransi risiko.

Sistem informasi berjalan dengan efektif dan efisien memiliki klasifikasi sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa 97,2% responden terkait sistem informasi telah berjalan efektif dan 2,8% responden terkait sistem informasi belum berjalan efektif.

Dilakukannya pengendalian fisik atas aktiva dan catatan memiliki klasifikasi sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa 96,3% responden selalu melakukan pengendalian fisik atas aktiva catatan dan 3,7% responden tidak begitu sering melakukan pengendalian fisik atas aktiva catatan.

Pemantauan di instansi dilakukan secara periodik memiliki klasifikasi sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa 99,1% responden melakukan pemantauan secara periodik dan 0,9% responden belum melakukan pemantauan secara periodik.

Pemantauan dilakukan untuk menilai kualitas dalam pengendalian internal memiliki klasifikasi sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa 96,3% responden telah melakukan pemantauan untuk menilai kualitas pengendalian internal dan 3,7% responden kurang melakukan pemantauan untuk menilai kualitas pengendalian internal.

3. Kinerja Pemerintah Daerah Pada SKPD Kota Tasikmalaya

Kinerja pemerintah daerah pada dasarnya adalah hasil kerja yang telah dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang telah diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2016: 67). Kinerja pemerintah daerah di Kota Tasikmalaya sudah tergolong kategori sangat baik. Agar terlaksananya kinerja pemerintah daerah yang berkualitas maka dibutuhkan *good governance* yang tertata dalam kinerja pemerintah daerah. *Good governance* atau tata kelola pemerintah yang tersusun dengan sistem pengendalian intern pemerintah yang memadai dapat membantu dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah yang berkualitas. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2018). Hasil penelitian menyatakan bahwa *good governance* dan sistem pengendalian intern pemerintah secara simultan memiliki pengaruh positif pada kinerja pemerintah.

Tercapainya target kinerja kegiatan dari program yang telah direncanakan memiliki klasifikasi sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa 94,3% responden telah mencapai target kinerja kegiatan dari program yang direncanakan dan 5,7% responden belum mencapai target kinerja kegiatan dari program yang direncanakan.

Ketepatan kesesuaian antara hasil kegiatan dengan program kerja yang telah direncanakan memiliki klasifikasi sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa 96,5% responden selalu sesuai antara hasil dan program kerja yang direncanakan dan 3,5% responden kurang sesuai antara hasil dan program kerja yang direncanakan.

Tingkat pencapaian program kerja yang ditetapkan berjalan maksimal memiliki klasifikasi sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa 96,2% responden selalu berjalan maksimal dalam pencapaian program kerja dan 3,8% responden belum berjalan maksimal dalam pencapaian program kerja.

Dampak yang dirasakan masyarakat atas hasil kegiatan atau program kerja yang telah dilakukan memiliki klasifikasi sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa 93,2% responden selalu memberikan dampak kepada masyarakat atas hasil program kerja dan 6,8% responden tidak memberikan dampak kepada masyarakat atas hasil program kerja.

Kesesuaian antara realisasi anggaran dengan anggaran yang ditetapkan untuk pelaksanaan program kerja memiliki klasifikasi sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa 95,3% responden telah sesuai antara realisasi anggaran dengan anggaran yang ditetapkan dan 4,7% responden kurang sesuai antara realisasi anggaran dengan anggaran yang ditetapkan.

Kesesuaian antara pencapaian realisasi belanja dengan standar belanja memiliki klasifikasi sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa 97,5% responden selalu sesuai antara pencapaian realisasi belanja dengan standar belanja dan 2,5%

responden tidak pernah sesuai antara pencapaian realisasi belanja dengan standar belanja.

Moral yang diterapkan pegawai instansi sudah baik terhadap pencapaian kinerja memiliki klasifikasi sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa 98,2% responden selalu menerapkan moral yang baik terhadap pencapaian kinerja dan 1,8% responden kurang menerapkan moral yang baik terhadap pencapaian kinerja.

4.2.2 Pengaruh *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada SKPD Kota Tasikmalaya

Pengujian statistik ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara *Good Governance* (X_1) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X_2) terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya (Y), dimana pengolahan data dan hasil menggunakan SPSS versi 25. Dari output SPSS (Terlampir) tersebut dapat ditemukan analisis sebagai berikut:

1. Uji Validitas

Dari hasil uji validitas terkait *Good Governance* (X_1) secara keseluruhan angka yang didapat dari pernyataan pertama sampai dengan pernyataan kelima belas dari hasil pengujian diperoleh hasil r tabel 0,229 dengan hasil t hitung $> r$ tabel (Terlampir). Sehingga dapat disimpulkan uji validasi *Good Governance* terpenuhi.

Dari hasil uji validitas terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X_2) secara keseluruhan angka yang didapat dari pernyataan pertama sampai dengan pernyataan ketujuh dari hasil pengujian diperoleh hasil r tabel 0,229

dengan hasil hasil t hitung $>$ r tabel (Terlampir). Sehingga dapat disimpulkan uji validasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terpenuhi.

Dari hasil uji validitas terkait Kinerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya (Y) secara keseluruhan angka yang didapat dari pernyataan pertama sampai dengan pernyataan ketujuh dari hasil pengujian diperoleh hasil r tabel 0,229 dengan hasil hasil t hitung $>$ r tabel (Terlampir). Sehingga dapat disimpulkan uji validasi Kinerja Pemerintah Daerah terpenuhi.

2. Uji Reliabilitas

Dari hasil uji reliabilitas terkait *Good Governance* (X_1) secara keseluruhan angka yang didapat dari hasil perhitungan SPSS versi 25 menunjukkan hasil dengan angka *cronbach alpha* 0,826 $>$ r tabel sebesar 0,229. Sehingga uji reliabilitas *Good Governance* terpenuhi.

Dari hasil uji reliabilitas terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X_2) secara keseluruhan angka yang didapat dari hasil perhitungan SPSS versi 25 menunjukkan hasil dengan angka *cronbach alpha* 0,849 $>$ r tabel sebesar 0,229. Sehingga uji reliabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terpenuhi.

Dari hasil uji reliabilitas terkait Kinerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya (Y) secara keseluruhan angka yang didapat dari hasil perhitungan SPSS versi 25 menunjukkan hasil dengan angka *cronbach alpha* 0,812 $>$ r tabel sebesar 0,229. Sehingga uji reliabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya terpenuhi.

4.2.2.1 Pengaruh Parsial

4.2.2.1.1 Pengaruh *Good Governance* terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada SKPD Kota Tasikmalaya

Di bawah ini merupakan tampilan dari pengaruh langsung maupun tidak langsung *Good Governance* (X_1) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X_2) terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada SKPD Kota Tasikmalaya (Y).

Tabel 4.38
Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung X_1 Terhadap Y

Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung		Besar Kontribusi	Persentase
X_1 Langsung	$(\rho_{Y X_1})^2$ $(0,367)^2$	0,135	13,5%
X_1 Melalui X_2	$(\rho_{Y X_1}) (r_{X_1 X_2}) (\rho_{Y X_2})$ $(0,367) (0,584) (0,523)$	0,112	11,2%
Total Pengaruh X_1 Terhadap Y		0,247	24,7%

Sumber: Hasil Penelitian, 2023

Dapat diketahui bahwa pengaruh langsung *Good Governance* (X_1) terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya (Y) tanpa memperhatikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X_2) sebesar 13,5% dan untuk pengaruh tidak langsung *Good Governance* (X_1) terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya (Y) jika dilihat adanya keterkaitan dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X_2) yaitu sebesar 11,2%. Sehingga dapat diketahui total dari pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya (Y) yaitu 24,7%.

Dengan demikian kenaikan yang terjadi pada Kinerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya sebesar 24,7% dipengaruhi oleh *Good Governance* di SKPD Kota Tasikmalaya.

4.2.2.1.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada SKPD Kota Tasikmalaya

Berikut ini ditampilkan hasil dari perhitungan mengenai pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X_2) terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada SKPD Kota Tasikmalaya (Y).

Tabel 4.39
Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung X_2 Terhadap Y

Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung		Besar Kontribusi	Persentase
X_2 Langsung	$(\rho_{Y X_2})^2$ $(0,523)^2$	0,274	27,4%
X_2 Melalui X_1	$(\rho_{Y X_2}) (r_{X_2 X_1}) (\rho_{Y X_1})$ $(0,523) (0,584) (0,367)$	0,112	11,2%
Total Pengaruh X_2 Terhadap Y		0,386	38,6%

Sumber: Hasil Penelitian, 2023

Dapat diketahui bahwa pengaruh langsung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X_2) terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya (Y) tanpa memperhatikan *Good Governance* (X_1) sebesar 27,4% dan untuk pengaruh tidak langsung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X_2) terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya (Y) jika dilihat adanya keterkaitan dengan *Good Governance* (X_1) yaitu sebesar 11,2%. Sehingga dapat diketahui total dari pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya (Y) yaitu 38,6%.

Dengan demikian peningkatan yang terjadi pada Kinerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya sebesar 38,6% dipengaruhi oleh peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di SKPD Kota Tasikmalaya. Dari hasil pengujian secara parsial dapat diketahui terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diperoleh bahwa t hitung $5,809 > t$ tabel $1,667$ dengan demikian H_0 ditolak, dengan nilai probabilitas $0,00 < 0,05$, maka terdapat pengaruh yang signifikan dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya sebesar 38,6%.

Hasil penelitian ini didukung oleh Kusuma (2021), yang mengatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mempunyai pengaruh signifikan terhadap kenaikan dan penurunan Kinerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya.

Tabel 4.40
Total Pengaruh X_1 , X_2 , terhadap Y

Variabel	Besar Kontribusi	Persentase
$X_1 - Y$	0,247	24,7%
$X_2 - Y$	0,386	38,6%
Total Pengaruh X_1, X_2, terhadap Y	0,632	63,2%

Sumber: Hasil Penelitian, 2023

Dari perhitungan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa *Good Governance* (X_1) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X_2) secara bersama berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di SKPD Kota Tasikmalaya (Y) yaitu sebesar 63,2%.

Tabel 4.41
Total Pengaruh Tidak Langsung X_1 , X_2 , terhadap Y

Variabel	Besar Kontribusi	Persentase
X_1 melalui $X_2 - Y$	0,112	11,2%
X_2 melalui $X_1 - Y$	0,112	11,2%
Total Pengaruh X_1, X_2, terhadap Y	0,224	22,4%

Sumber: Hasil Penelitian, 2023

Untuk hasil pengaruh tidak langsungnya sebesar 22,4%, sehingga *Good Governance* (X_1) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X_2) secara bersama baik pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di SKPD Kota Tasikmalaya (Y) sebesar 22,4%. Sedangkan besarnya pengaruh variabel lain yang tidak diteliti terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di SKPD Kota Tasikmalaya (Y) yaitu sebesar 0,05%. Berdasarkan hasil perhitungan maka dapat diketahui variabel yang memiliki pengaruh terkecil terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di SKPD Kota Tasikmalaya (Y) adalah *Good Governance* (X_1), yaitu sebesar 24,7%. Sedangkan pengaruh terbesar terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di SKPD Kota Tasikmalaya (Y) adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X_2), yaitu sebesar 38,6%.

4.2.2.2 Pengaruh Simultan

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji pengaruh *Good Governance* (X_1) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X_2) terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di SKPD Kota Tasikmalaya (Y). Dalam uji hipotesis ini menggunakan uji statistik *path analysis* (analisis jalur). Hasil perhitungan korelasi menggunakan program bantuan *software* SPSS versi 25, berikut tabelnya:

Tabel 4.42
Matrik Korelasi Antar Variabel Bebas

<i>Pearson Correlation</i>	X₁	X₂
X ₁	1	0,584
X ₂	0,584	1

Sumber: Hasil Penelitian, 2023

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh besarnya nilai korelasi antara X₁ dan X₂ adalah 0,584. Dapat dilihat terdapat hubungan antar variabel yang sangat kuat. Selanjutnya koefisien jalur dapat diketahui berdasarkan korelasi antar variabel. Dengan menggunakan SPSS versi 25 hasil yang didapatkan untuk koefisien jalur dari *Good Governance* (X₁) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X₂) terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di SKPD Kota Tasikmalaya (Y), sebagai berikut:

Tabel 4.43
Besar Koefisien Jalur

<i>Pearson Correlation</i>	Koefisien Jalur	Koefisien Korelasi	Koefisien Determinasi	KND
X ₁	$\rho_{Y X_1} = 0,367$	0,795	0,632	0,05
X ₂	$\rho_{Y X_2} = 0,523$			

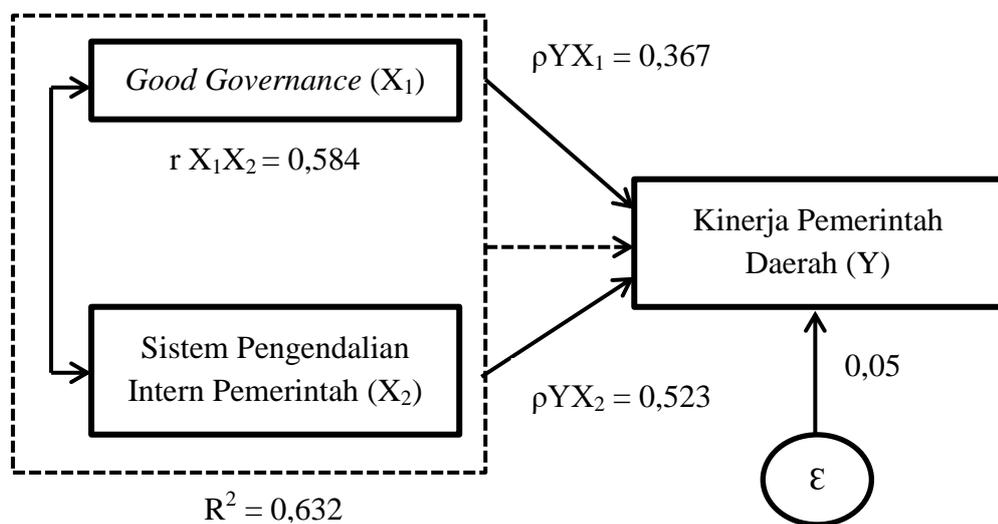
Sumber: Hasil Penelitian, 2023

Koefisien jalur untuk pengaruh dari masing-masing variabel terlihat pada kolom koefisien jalur dari hasil perhitungan SPSS. Diperoleh hasil pengaruh *Good Governance* (X₁) terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di SKPD Kota Tasikmalaya (Y) memiliki koefisien jalur ($\rho_{Y X_1}$) yang bertanda positif dengan nilai sebesar 0,367, untuk pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X₂)

terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di SKPD Kota Tasikmalaya (Y) memiliki koefisien jalur ($\rho_{Y X_2}$) yang bertanda positif dengan angka sebesar 0,523.

Besar pengaruh secara bersama-sama (simultan) *Good Governance* (X_1) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X_2) terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di SKPD Kota Tasikmalaya (Y) ditunjukkan dengan hasil nilai koefisien determinasi (R^2), yaitu sebesar 0,632 atau 63,2%. Koefisien Non Determinasi (KND) variabel lain di luar *Good Governance* (X_1) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X_2) terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di SKPD Kota Tasikmalaya (Y) didapatkan hasil 0,05.

Sehingga berikut dapat digambarkan hubungan pengaruh (X_1) dan (X_2) terhadap (Y):



Gambar 4.1
Diagram Jalur Pengaruh X_1 dan X_2 terhadap Y

Dengan memperhatikan tabel dan gambar di atas, maka diperoleh persamaan jalur sebagai berikut:

$$Y = 0,367 X_1 + 0,523 X_2 + \varepsilon$$

Hipotesis utama pada penelitian ini adalah *Good Governance* (X_1) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X_2) berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di SKPD Kota Tasikmalaya (Y).

Tabel 4.44
Rekapitulasi Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung

No	Nama Variabel	Formula	
1.	<i>Good Governance</i> (X_1): Pengaruh Langsung X_1 terhadap Y	$(\rho_{Y X_1})^2$	13,5%
	Pengaruh Tidak Langsung X_1 melalui X_2 terhadap Y	$(\rho_{Y X_1}) (r_{X_1 X_2}) (\rho_{Y X_2})$	11,2%
Total Pengaruh X_1 terhadap Y		$A + B$	24,7%
2.	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X_2): Pengaruh Langsung X_2 terhadap Y	$(\rho_{Y X_2})^2$	27,4%
	Pengaruh Tidak Langsung X_2 melalui X_1 terhadap Y	$(\rho_{Y X_2}) (r_{X_2 X_1}) (\rho_{Y X_1})$	11,2%
Total Pengaruh X_2 terhadap Y		$D + E$	38,6%
Total Pengaruh X_1, X_2 terhadap Y Secara Simultan		$C + F$	63,2%

Sumber: Hasil Penelitian, 2023